



**LAPORAN KINERJA**  
**TRIWULAN I**  
**Tahun 2025**  
**BALAI KIPM JAKARTA II**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan I Tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 April 2025

Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dede Suhendra, S.Pi, M.Si

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
1.1 Sasaran .....	7
1.2 Indikator dan Target Kinerja.....	8
1.3 Pengukuran Kinerja.....	10
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi .....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	33
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Rekomendasi .....	34
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi.....	34

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2025	
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta IITW I Tahun 2025	
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW I Tahun 2025 .....	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW I Tahun 2025 .....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW I Tahun 2025 .....	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW I Tahun 2025 .....	18
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW I Tahun 2025 .....	19
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW I Tahun 2025 .....	20
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW I Tahun 2025 .....	21
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW I Tahun 2025 .....	21
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW I Tahun 2025 .....	23
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW I Tahun 2025 .....	28
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW I Tahun 2025 .....	29
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW I Tahun 2025 .....	29
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW I Tahun 2025 .....	30
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW I Tahun 2025 .....	30
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 TW I Tahun 2025 .....	30
Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW I Tahun 2025 .....	38
Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja TW I Tahun 2025 .....	39

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 113,71%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan 1 adalah 70% dan realisasi 97,92% sehingga capaian 120%;
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II, target triwulan 1 adalah 70% dan realisasi 99,50%, dengan capaiannya 120%;
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II, target triwulan I 99% sudah tercapai 100% sehingga capaiannya 101,01 %;

Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang sesuai standar.

IKU untuk SS 2 tidak ada realisasi pada triwulan I tahun 2025 karena ditargetkan pada triwulan IV.

**Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.**

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- Persentase Rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 76%, realisasi 100% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 120%; Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II dari target 88%, realisasi 91,15% sehingga capaian nilai kinerja sebesar 103,58%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan I Tahun2025 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kewanaman hasil perikanan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Jakarta II) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan I tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keamanan Hasil Perikanan, sebagai penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

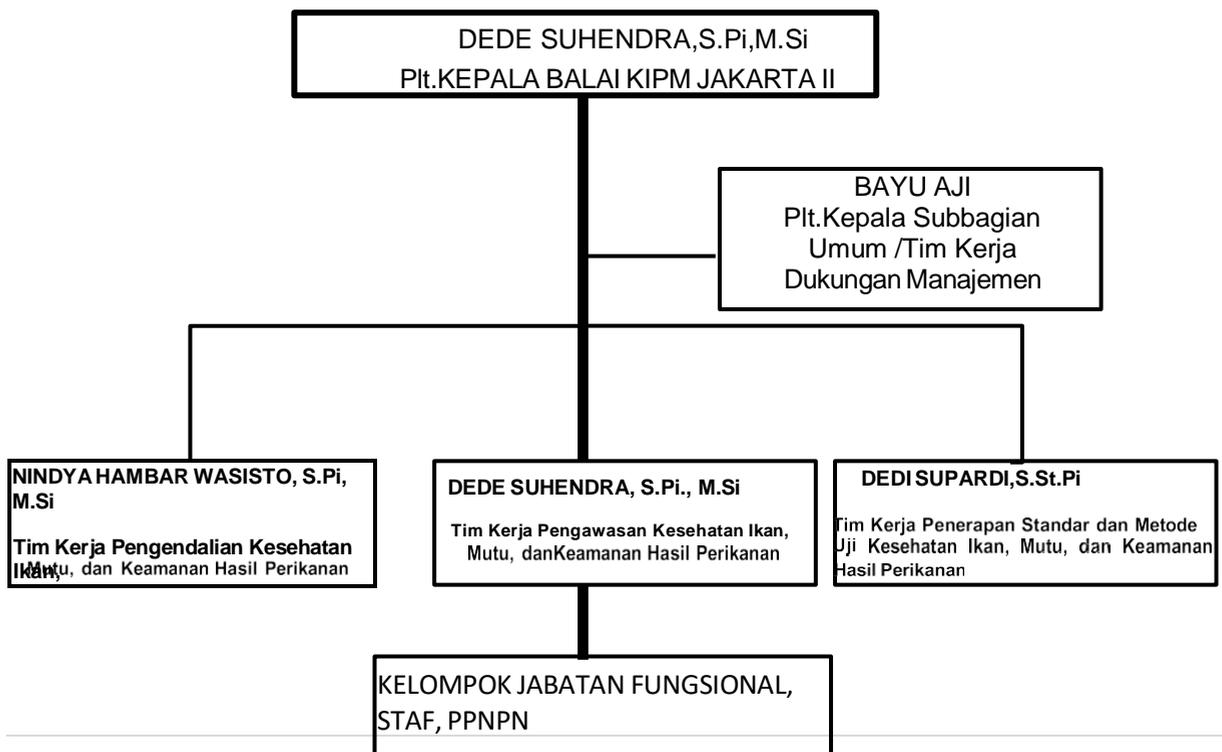
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

- A. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan; merupakan mempunyai tugas sebagai Quality Assurance;
- B. mengatur pelaksanaan system penjaminan mutu ditingkat lokal diseluruh negara.
- C. Memaparkan pada tingkat hulu, Lembaganya melaksanakan sertifikasi seperti Cara penanganan yang baik (good handling practices), Cara budidaya ikan yang baik (good aquaculture practices), Cara produksi obat ikan yang baik (good fish drugs production practices), Cara produksi pakan ikan yang baik(good fish feed production practices), Cara penanganan yang baik di atas kapal penangkap ikan (good handling practices on board fishing ports) ;
- D. Sementara pada tingkat hilir, BPPMHKP melaksanakan sertifikat cara pembuatan yang baik (good manufacturing practices), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan pengelolaan distribusi ikan yang baik (good fish distribution management practices). Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 2 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda (2 orang ketua Pokja)

1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 4 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 3 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda ( 2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 4 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 4 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 11 orang PJLP.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II**



### 1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

## 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

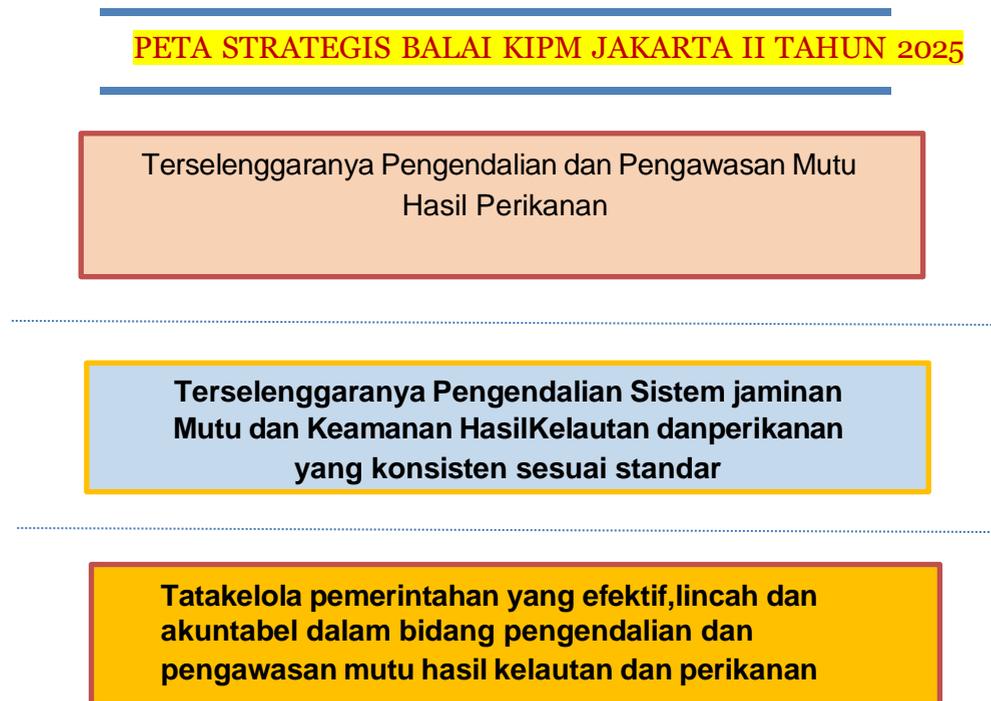
Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Triwulan I Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 **Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2025**

## 2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 15 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				2025	TW I
<b>Kegiatan 1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	70
		3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Jakarta II ( <b>lokasi</b> )	1	-
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II ( <b>persen</b> )	99	99
<b>Kegiatan 2. Manajemen Mutu</b>					
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan mutu dan Keamanan hasil Kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Lingkup di Balai KIPM Jakarta II ( <b>Nilai</b> )	75	-

		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi Lingkup di Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	75	-
SK3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	92	-
		8	Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	71,5	-
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II <b>(%)</b>	100	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Indeks)</b>	87	-
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	86	-
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(%)</b>	85	85
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II <b>(%)</b>	76	76
		14	Persentase pemenuhan Dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II <b>(%)</b>	70	-
		15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>	88	88

## 1.4 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan

jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

Angka maksimum adalah 120;

Angka minimum adalah 0;

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

**Polarisasi Maximize**

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU =  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$

**Polarisasi Minimize**

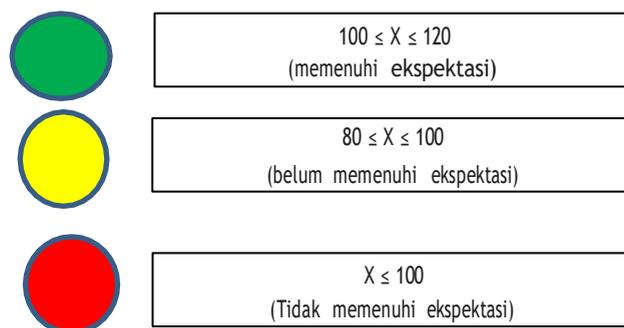
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$

**Polarisasi Stabilize**

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

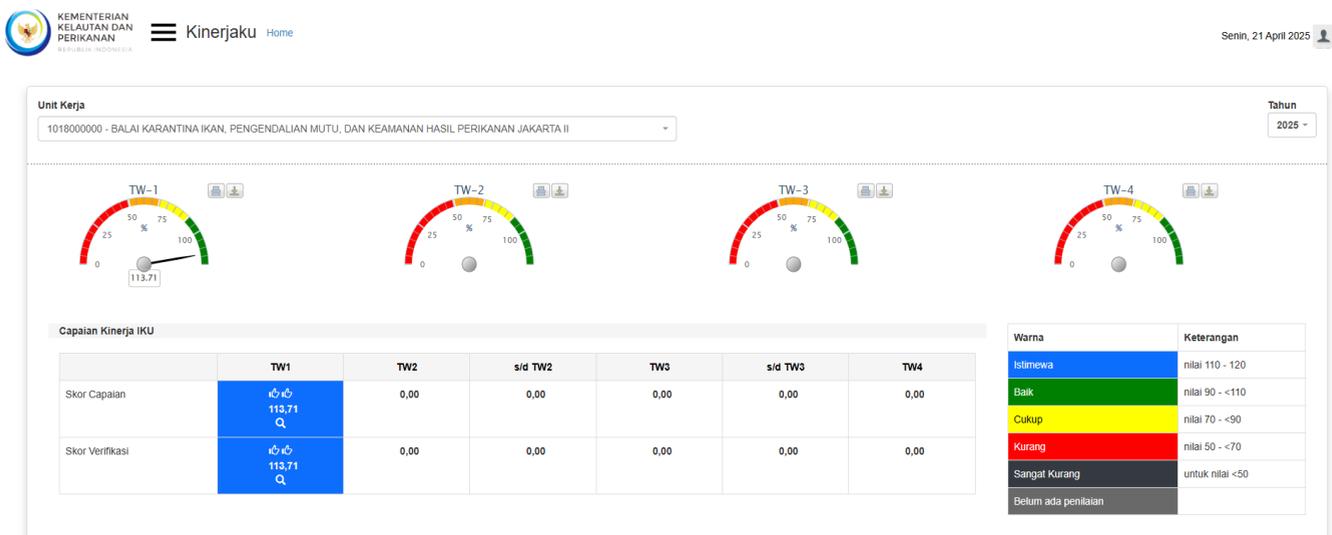
1. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,71 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



**Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK**

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN I 2025		
				TARGET	REALISASI	%
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70	97,92	120
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	70	99,5	120
		3	Lokal pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II ( <b>lokasi</b> )	-	-	-
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II ( <b>persen</b> )	99	100	101,01

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN I 2025		
				TARGET	REALISASI	%
<b>Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian Sistem jaminan mutuan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai KIPM Jakarta II ( <b>Nilai</b> )	-	-	-
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Jakarta II ( <b>Nilai</b> )	-	-	-
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP</b>						
SK3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
		8	Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	-	-	-
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	-	-	-
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)	85	100	117,65
		13	Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan yang pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76	100	120
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	88	91,15	103,58

## 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

### Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar.

### **Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

### **IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya;

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: Standar Nasional Indonesia (SNI) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di Balai KIPM Jakarta II, pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini mempunyai target 70% dan realisasi adalah 97,92% dengan persentase capaian sebesar 120%

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan,lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	-	97,92	70%	97,92	120%	70%	83,33%

**IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
  2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
  3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan pada Triwulan I Tahun 2025 ditargetkan 70%, realisasi adalah 99,50% dengan capaian persentase sebesar 120%

**Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	99,50%	70%	99,50	120%	70%	72,04%

### **IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic; Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Pada tahun 2025 indikator ini merupakan IKU baru di BKIPM Jakarta II, dan Pada Triwulan I indikator ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada semester.

**Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup	-	-	-	-	-	-	-

**IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor); Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional; Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. pada triwulan I Tahun 2025 mempunyai target adalah 99%, realisasi sebesar 100% dengan persentase 101,01%.

**Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	100%	99%	100%	101,01%	-	-

## Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar lingkup Balai KIPM Jakarta II.

### IK5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar;

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di laboratorium *official control*;

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indikator ini merupakan iku baru di BKIPM Jakarta II dan pada triwulan I tahun 2025 tidak ada target dan realisasi, karena ditargetkan pada akhir tahun.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

## IK6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2025 indikator ini merupakan iku baru di BKIPM Jakarta II dan pada triwulan I tahun 2025 tidak ada target dan realisasi, karena ditargetkan pada akhir tahun.

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

### Kegiatan Sekretariat BKIPM

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II.**

### Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM.

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ingkup Balai KIPM Jakarta II menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Jakarta II. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang yang efektif, licah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II.

## IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiscal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

**Tabel 9** Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
<b>Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II</b>	-	-	-	-	-	-	-

## IK8. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Jakarta II

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Pada triwulan I IKU ini tidak ada target dan realisasi karena ditargetkan pada akhir tahun.

**Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Indikator kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta I	-	-	-	-	-	-	-

## IK9. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Cara Perhitungan rumus sebagai berikut :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2025 IKU ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada triwulan IV atau akhir tahun.

**Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II	-	-	-	-	-	-	-

### IK.10 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi;
- Kompetensi;
- Kinerja; dan
- Disiplin.

dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22.5</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17.5</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke bawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
  - b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
    - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
  - c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 target 86 dan tidak ada realisasi karena perhitungannya per semester.

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-

### IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

## FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri **Sekretariat Es.1**
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
<b>AA</b>	>90 – 100	Sangat Memuaskan
<b>A</b>	>80 – 90	Memuaskan
<b>BB</b>	>70 – 80	Sangat Baik
	>60 – 70	Baik
<b>CC</b>	>50-60	Cukup
	>30 – 50	Kurang
<b>D</b>	0 – 30	Sangat Kurang

Pada Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86, namun pada triwulan I Tahun 2025 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

**Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
<b>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP</b>	-	-	-	-	-	-	-

### IK12. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin

berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra 2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100%	100%	85%	100%	117,65%	70%	100%

**IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan barang/jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pada triwulan I IKU ini mempunyai target 76% dan realisasi adalah 100% dengan persentase 120%.

**Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target	Persen
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	100	76%	100%	120%	75%	100%

**IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)**

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

**Cara Pengukuran rumus sebagai berikut :**

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, meliputi

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada triwulan I iku ini tidak ada realisasi karena ditargetkan pada akhir tahun. Dan IKU ini merupakan kegiatan baru pada indikator kinerja kegiatan.

**Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	-	-	-	-	-	-	-

#### **IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II**

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: [https://ptsp.kkp.go.id/skm/login\\_Aplikasi](https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi) yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan

Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

**Cara Perhitungan Rumus Sebagai Berikut :**

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

**IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi**

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25.**

Pada triwulan I IKU ini mempunyai target 88 dan realisasi adalah 91,15 dengan persentase 103,57%, dibandingkan dengan tw.1 tahun 2024 lebih meningkat realisasi capaian kinerja.

**Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I Tahun 2024-2025		Target dan Realisasi TW I Tahun 2025			Renstra2020-2024	
	2024	2025	Target	Realis asi	%	Target	Persen
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	87,50	91,15	88	91,15	103,58%	84	100%

## 1.1 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. **6.910.861.000** dan pada triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. **1,806,134,122** atau sebesar **26,13 %** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW I T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2025**

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
1	7010	Manajemen Mutu	134,000,000	-	-
2	3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	330,000,000	21,100,000	6,39
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	6,446,861,000	1,785,034,122	27,69
		<b>TOTAL</b>	<b>6,910,861,000</b>	<b>1,806,134,122</b>	<b>26,13</b>

**Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan I Tahun 2025**

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,508,705,000	989,265,694	28,19
2	Belanja Barang	3,402,156,000	816,868,428	24,01
3	Belanja Modal	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>6,910,861,000</b>	<b>1,806,134,122</b>	<b>26,13</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan I Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada triwulan I tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 113,71, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 15 Indikator Kinerja terdapat 6 indikator kinerja yang sudah tercapai realisasi dan target pada Triwulan I. Sedangkan 9 indikator kinerja belum tercapai realisasi dan target karena ditargetkan pada semesteran dan tahunan.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan I tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

#### **4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA**

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2024, yaitu :

1. Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan sudah tidak tercantum lagi dalam Perjanjian Kinerja.

2. Indikator Kinerja kegiatan dalam Perjanjian Kinerja pada triwulan I tahun 2025 terdapat IKU baru yaitu sebagai berikut :

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II
- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II
- Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II
- Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II
- Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II

